

KUASA DAN KEKERASAN : KELEMBAGAAN PREMANISME YOGYAKARTA PASKA REFORMASI

Wasisto Raharjo Jati^{*)}

Abstract

After "Reformasi", the state lost his governability that implicate frozen democracy. Frozen democracy represent the terms which snugly to depict the resignation of state in social politics arena in society so that creater vacuum of power nowadays. This opportunity later then generate to attend the non state actors to exploit that's for the sake of person and also groups. For the reason later then happen contestation in reaching for the power by using violence as instrument. As for this violence is happened by as existing state deligimation to making prosperity function so that generate the informal power in society especially urban society. "Preman" as informal violence actor realize vacuum of power in society with forming organizational assorted. By defining democratize their own version, "preman" tried to run the prosperity function among them in violence logic with their repressive and intimidation act. Therefore by adopting the seminal concept of structural - violence in the Johan Galtung' violence theory, this paper endeavors to analyse the violence logic in informal power conducted by "preman" in dynamics of urban society.

Kata kunci : Preman, Premanisme, Kekerasan, dan Kekuasaan.

Pendahuluan

Fenomena premanisme merupakan salah satu khazanah sosiologis pergulatan kehidupan yang terjadi di perkotaan ketika kerasnya hidup memaksa semua orang untuk menekuni bidang apapun manakala cara yang dirasa wajar dirasa sulit untuk mencari sumber pendapatan demi kebutuhan dapur supaya terus mengepul. Dalam hal ini bisa diindikasikan bahwa alasan klasik desakan ekonomi serta pola survivalitas di perkotaan yang kian sengit, maka memunculkan preman sebagai aktualisasi aktor ekonomi informal di perkotaan. Adapun pola pergerakan premanisme yang cenderung represif dan koersif seperti halnya aksi pemalakan, pencopetan, serta berbagai hal aksi kriminalitas lainnya ini memang dirasa sangat meresahkan masyarakat sebagai korban. Akan

^{*)} Peneliti Sosiologi Politik dan Kekerasan Sipil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM,
Email : wasisto.raharjo@mail.ugm.ac.id

tetapi dari sudut pandang premanya sendiri hal itu terjadi dikarenakan keterpaksaan di saat mereka gagal mendapatkan akumulasi kue perekonomian yang berpusat di kota sehingga sekedar untuk mencari remah – remahnya saja, aksi penistaan tersebut pun menjadi hal wajib walaupun nantinya akan melanggar norma sosial dan hukum¹. Oleh karena itulah masalah disparitas terhadap redistribusi kesejahteraan sosial di antara penduduk perkotaan menjadi isu pelik dan sensitif dimana preman yang berangkat dari golongan ekonomi bawah menjadi elemen penduduk yang terpidanakan dan dicap sampah masyarakat oleh sebagian penduduk kota lainnya.

Maka untuk menanggapi permasalahan kesejahteraan preman sekaligus untuk mereduksi angka kriminalitas Kota Yogyakarta dibentuklah suatu organisasi gerakan kemasyarakatan semacam paguyuban dinamakan "Paguyuban Alit Mrantasi Gawe" yang dideklarasikan April 2010 sebagai manifestasi politisasi berasal dari pemotongan dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi pada tahun 2006 silam yang dilakukan oleh para birokrat dengan menggunakan unsur kekerasan preman sehingga menimbulkan kontestasi antar preman demi perilaku koruptif para birokrat tersebut. Menyadari hal tersebut akan merugikan sesama preman sendiri, maka dibentuklah suatu organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan oleh para mantan preman, preman, tukang becak, pengangguran, pedagang asongan dan pekerja informal lainnya. Ihwal pembentukan "organisasi preman" ini untuk melembagakan preman supaya berhenti melakukan aksi kekerasan jalanan sehingga stereotip negatif preman hilang dan memperjuangkan kesejahteraan para preman.

Namun, pembentukan organisasi preman yang dirasa baik secara tujuan maupun substansi justru mengedepankan cara – cara konservatif dalam menjalankan organisasinya seperti halnya melakukan tindak kekerasan baik itu dilakukan secara pribadi maupun komunal seperti pada umumnya yang ada dalam *stereotype* masyarakat selama ini terhadap eksistensi preman. Kekerasan disini kemudian tidak hanya dipahami sebagai instrumentasi semata, dimensi kekerasan kemudian meluas baik dalam bentuk institusional, personal, maupun struktural dalam hal ini kemudian ketiganya saling bertautan satu sama lain sehingga membentuk pola kontinu dimana kekerasan akan dibalas dengan bentuk kekerasan lainnya (*violence beget violence*) yang kesemuanya bersumber pada ketidakadilan. Oleh karena itu kemudian kekerasan bersumber pada ketidakadilan². Oleh karena itu dalam melawan ketidakadilan terutama dalam bidang ekonomi dan politik, kekerasan manifest yang cenderung intimidatif

¹ Terry Christensen, *Local Politics : Governing at The Grassroots* (California : Wadsworth, 2004), hal. 34.

² Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* (Yogyakarta : Insist Press, 2000), hal. 67.

menjadi hal yang wajib dilakukan oleh para preman sebagai wujud ketidakadilan yang selama ini diterima mereka sebagai warga kelas dua dalam iklim kehidupan perkotaan yang semakin kompetitif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tinggi dan juga sebagai wujud kegagalan negara dalam mengelola dan meredistribusikan *public goods* yang merata di antara para warganya sehingga memunculkan adanya kekerasan sipil yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masyarakat. Dari situ kemudian, kekerasan bertransformasi sumber daya material yang melekat pada preman sehingga mereka menciptakan kekuasaan yang informal dalam struktur masyarakat dimana mereka kemudian menjadi tokoh masyarakat setempat. Implikasi yang timbul kemudian adalah kontestasi perebutan kekuasaan informal antar preman baik pribadi maupun kelompok dikarenakan kemanfaatan ekonomi yang mereka dapatkan apabila berhasil mendapat daerah operasi yang mereka dapatkan sehingga kerap kali timbul kekerasan jalanan dalam masyarakat perkotaan³.

Berdasarkan pada premis di atas, Paguyuban Alit Mrantasi Gawe ini merupakan bentuk kamufase kekerasan dalam kebekuan demokrasi (*frozen democracy*) dewasa ini. Walaupun pemberdayaan maupun kesejahteraan melalui *soft power* sebagai tujuan utamanya, hal itu hanyalah praktik kamufase dan politik pencitraan yang dijalankan organisasi ini. Kamufase itu terindikasi dalam pola relasi mencari kekuasaan ekonomi informal dengan menggunakan pendekatan premanisme⁴. Oleh karena itulah, terindikasi bahwa organisasi ini berusaha mencari celah bersaing dan berebut wilayah kekuasaan dengan organisasi sejenis untuk menjadi penguasa informal, sehingga dengan semakin banyak daerah operasi yang mereka kuasai Maka kelompok premanisme ini akan mendapatkan risorsis ekonomi informal serta legitimasi informal yang akan disematkan masyarakat kepada organisasi preman ini sehingga menciptakan hubungan patronialisme yang mengakar kuat antara organisasi preman dengan masyarakat yang menjadi daerah operasinya.

Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan pertautan antara kekuasaan dan kekerasan yang terdapat dalam mekanisme organisasi preman ini sebagaimana yang telah dilustrasikan di atas. Dengan mengkaitkannya dengan studi dinamika kehidupan masyarakat perkotaan dimana premanisme ini menjadi isu permasalahan kriminalitas yang cukup pelik dan politik informal yang selama ini belum terobservasi dan tereksplorasi secara menyeluruh dalam berbagai studi tentang kajian politik perkotaan di Indonesia, maka tulisan ini akan memahami

³ Tadjuddin Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, & Sektor Informal di Kota* (Jakarta : YOI Press, 1996), hal. 45.

⁴ Anggito Abimanyu, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Rakyat* (Yogyakarta : PAU UGM), hal. 23.

pola relasi kuasa dan kekerasan dalam bingkai konsepsi kekerasan struktural dalam teorisasi Johan Galtung sehingga diharapkan mampu memberi gambaran mengenai kekuasaan politik informal perkotaan yang ada dimana instrumentasi kekerasan menjadi landasan utama dalam aplikasinya.

Paradigma Kekerasan Struktural

Dalam hal ini premis kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, penyerangan maupun penghancuran yang amat keras, kasar, tajam ataupun sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Kekerasan sendiri kemudian berkembang dan ditafsirkan secara beragam oleh berbagai aktor apakah kekerasan itu hanya dimaknai sekedar instrumentasi, Kekerasan sebagai suatu produk struktural sosial atau kekerasan sebagai bagian dari jejaring antara aktor dalam bingkai struktur organisasional yang sifatnya hierarkis. Maka berbagai argumentasi tentang konsepsi mengenai kekerasan sendiri dapat terbagi dalam tiga kategori kelompok besar yakni.

- *Kelompok Pertama* yang dipelopori oleh para psikolog. Kekerasan sendiri merupakan bentuk askriptif yang dibawa oleh manusia sejak dari lahir (*innate*) dimana kekerasan sendiri muncul sebagai konsekuensi dan kelainan biologis manusia. Oleh karena itulah kekerasan sendiri merupakan dinamika kehidupan biologis manusia terhadap responnya kepada lingkungan sekitarnya
- *Kelompok Kedua* memahami kekerasan sendiri bagian dari tindakan manusia yang terikat kepada struktur, mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang yang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri yang dimilikinya. Dalam hal ini kekerasan yang bersifat struktural ini bersifat tidak tampak (*invisible*) dan dilakukan tidak secara langsung dilakukan. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan definisi kekerasan oleh kelompok pertama, kekerasan ini dilakukan secara terselubung dan tersembunyi sehingga kekerasan yang dilakukan oleh banyak subjek yang jumlahnya tidak terbatas baik itu kepada aktor maupun kelompok aktor, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh struktur aparat pemerintah yang memiliki kewenangan yang sah dalam melakukan kekerasan
- *Kelompok Ketiga* memahami bahwa kekerasan ini dilakukan oleh jejaring beberapa aktor dengan struktur organisasi yang jelas. Kekerasan kemudian dimaknai segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh aktor tunggal, kelompok, bahkan struktur dikarenakan terdapat berbagai koherensi perpaduan antara kekerasan yang sifatnya mikro dilakukan

aktor tunggal maupun kekerasan yang sifatnya makro dilakukan oleh struktur organisasional⁵.

Maka gejala akan timbulnya praktik kekerasan itu bersumber kepada satu muara yakni ketidakadilan yang diterima dalam struktur mikro maupun makro dimana terjadi adanya pola segregasi yang ada di dalam masyarakat. Kondisi yang sedemikian adanya lantas membentuk sub humanisasi dalam masyarakat yang digambarkan sebagai kondisi serba kekurangan dihadapi aktor dalam kehidupan yang kemudian memicu adanya praktik kekerasan⁶. Secara lebih lanjut, kondisi subhumanisasi ini membentuk suatu ketengan terus menerus dalam masyarakat yang kemudian memunculkan resistensi dari masyarakat sipil. Subhumanisasi lantas mengakibatkan alienisasi maupun dehumanisasi yang dialami aktor maupun komunitas karena tekanan struktural yang dialami oleh berbagai lapisan aktor masyarakat untuk memicu terjadinya kekerasan⁷. kondisi sub humanisasi yang mengikat dan membelenggu para aktor maupun komunitas ini menimbulkan kondisi lingkaran setan dimana kekerasan yang mulanya hanya kekerasan personal lantas kemudian menimbulkan kekerasan yang bersifat struktural dan sebaliknya kekerasan struktural kemudian menghasilkan adanya kekerasan yang bersifat personal, dan seterusnya terjadi secara berulang – ulang. Oleh karena itulah kemunculan aktor informal dalam masyarakat hadir dari kondisi subhumanisasi seperti ini dimana mereka berusaha mencari celah kekuasaan yang informal dengan menggunakan kekerasan sebagai wujud resistensi atas ketimpangan sosial yang ada di dalam struktur masyarakat.

Dalam pandangan Johan Galtung, kekuasaan sendiri timbul dari adanya relasi yang represif dan eksploitatif sehingga mengakibatkan hubungan antara beberapa aktor sendiri tidak seimbang satu sama lain⁸. Oleh karena itu terjadi perbedaan otoritas dan wewenang di antara beberapa aktor dalam hubungan yang struktural dimana perbedaan tersebut didasari pada sumber daya kekuasaan yang melekat di masing – masing aktor dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini sumber daya kekuasaan sendiri terdiri dari tiga hal yakni kekuasaan ideologik yang meliputi penguasaan wacana maupun pemikiran, kekuasaan remuneratif yang meliputi penguasaan sumber daya ekonomi, dan kekuasaan punitif yang berhubungan dengan sumber daya kekerasan. Akumulasi dari ketiga sumber daya kekuasaan tersebut membentuk adanya kekerasan struktural yang cenderung terfagmen dan eksploitatif

⁵ Hannah Arendt, *Teori Kekerasan* (Yogyakarta : LPIP, 2003), hal. 56.

⁶ *Ibid*, hal. 46-48.

⁷ Anthony Giddens, *Sociology* (Oxford : Blackwell, 2002), hal. 15-18.

⁸ Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama* (Surabaya : Pustaka Utan Kayu, 2001),hal 67

Kekerasan struktural dibangun ke dalam sistem sosial dan yang berbeda yang diindikasikan dengan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, peluang pendidikan dan lain sebagainya. Kekerasan struktural bersinonim dengan unsur "ketidakadilan sosial." Kekerasan struktural sendiri merupakan bagian dari tipologi Galtung mengenai kekerasan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini⁹.

Tabel 1 : Tipologi Kekerasan Struktural Galtung

Violence typology according to Galtung	Need Groups			
	Well-being	Identity / purpose	Freedom	
Survival (Negation: death)	(Negation: poverty, illness)	(Negation: alienation)	(Negation: oppression)	
Direct violence	Killing	Injury, siege, sanctions, poverty	De-socialization, re-socialization, underclass	Repression, imprisonment, expulsion, deportation
Structural violence	Exploitation A	Exploitation B	Penetration, segmentation	Marginalization, fragmentation

Dari tabel di muka, setidaknya kita dapat menggambarkan bahwa ihwal terjadinya kekerasan struktural ini merupakan hasil dari marjinalisasi dan fragmentasi penduduk sehingga membuka jurang diferensiasi yang cukup besar. Dalam hal ini kekerasan struktural dilakukan dalam makro (organisasional) maupun mikro (oknum) dengan tujuan memperoleh kemanfaatan ekonomi maupun kekuasaan informal bagi mereka sendiri. Adapun kekerasan struktural sebagai sumber daya instrumentasinya sendiri terbagi atas berbagai jenis yakni kekerasan struktural yang bersifat *symbolic violence*, *unintended violence*, *latent violence*, dan kekerasan tanpa objek yang kesemuanya sendiri akan menghasilkan supremasi suatu aktor maupun kelompok terhadap masyarakat dalam hubungan yang hierarkis sehingga menciptakan kekuasaan informal dengan logika kekerasan / premanisme.

⁹ Windu Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta : Kanisius, 1991), hal.30.

- *Symbolic Violence* sendiri memaknai kekerasan yang dimaknai dengan simbolisasi tertentu yang berkaitan dengan sesuatu yang "sangat" maupun intimidatif. Kekerasan simbolik ini dapat berupa *tatto* di anggota tubuh, penggunaan bahasa kasar kepada orang lain, menggunakan berbagai benda tajam seperti halnya pisau, belati, dan senjata api maupun objek lainnya sehingga menyugesti seseorang untuk tunduk dan takut kepada kekerasan tersebut
- *Unintended Violence* memaknai kekerasan tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada objek, akan tetapi kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga yang terdapat dalam jejaring struktur organisasi tersebut sehingga kekerasan yang dilakukan tidak harus dikehendaki dilakukan aktor maupun struktur secara langsung
- *Latent Violence*, kekerasan struktural ini dilakukan secara tidak langsung diaktualisasikan kepada objek akan tetapi dilakukan secara tersamar maupun tersembunyi. Kekerasan model seperti ini biasanya menyaru atau berkamufase dalam sesuatu yang tidak mencurigakan bagi pihak lain, kekerasan ini biasanya tidak bersifat aktif tetapi bersifat pasif dikarenakan menunggu instruksi dari struktur yang berada di atasnya untuk kemudian melakukan tindak kekerasan. biasanya kekerasan seperti ini dilakukan secara terorganisir secara rapi dan akan bertindak cepat dalam melakukan kekerasan kepada suatu objek
- Kekerasan tanpa Objek ini berarti tindak kekerasan yang dimaksud dilakukan tidak mengharuskan melakukan kekerasan kepada objek yang sudah ditentukan. Artinya kekerasan sendiri dilakukan dalam beberapa objek tertentu baik itu dilakukan oleh aktor maupun struktur jaringan organisasi¹⁰.

Premanisme di Masa Reformasi

Selama ini preman mempunyai citra yang negatif di mata masyarakat pada umumnya. Citra preman sebagai orang yang bertubuh kekar, sangar, bertato, "nongkrong" di pinggir jalan, bahkan kebal senjata tajam telah melekat dalam benak masyarakat. citra tersebut ternyata berimplikasi panjang pada preman-preman itu sendiri yang tidak jarang justru menjadi ancaman bagi mereka. Pada masa Orde Baru, dimana pemerintah pernah melakukan operasi petrus (penembak misterius) untuk membasmi preman-preman yang dianggap "sampah masyarakat". Pada saat itu ciri khas khusus semacam *tatto* menjadi semacam tanda pengenalan bagi pasukan petrus untuk memembaknya.

¹⁰ Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 54.

Sebenarnya pandangan tersebut dapat dikatakan kurang tepat untuk menggambarkan preman secara keseluruhan, karena ada jenis-jenis "preman" lain yang seakan tidak memenuhi kriteria yang dibayangkan orang-orang, akan tetapi sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan apa yang dibayangkan masyarakat dengan sosok "preman lain" ini yaitu cara berpikir "preman" yaitu kekerasan. Cara berpikir inilah yang sejatinya menjadi tolak ukur untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika ada seorang yang kelihatannya bukan preman (ditinjau dari sisi fisik) akan tetapi ia mempunyai sumber daya yang memungkinkannya untuk mendirikan sebuah "struktur preman" dan menggunakan cara berpikir "preman", maka sejatinya ia adalah preman itu sendiri walaupun tidak mengakuinya. Menarik untuk memahami fenomena preman di masa reformasi. Dimana pasca reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim militer-birokratis yang memerintah Indonesia telah meninggalkan ruang baru bagi munculnya berbagai organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat maupun media-media yang pada masa orde baru yang sangat ketat pemberian izinnya¹¹. Bahkan pada saat itu tercatat berbagai organisasi maupun media yang vokal langsung dibredel atau anggotanya ditangkap. Kelonggaran inilah yang menyebabkan berbagai organisasi maupun lembaga bermunculan luar biasa. Salah satu yang fenomenal terangkat seperti FPI yang sepak terjangnya menuai pro kontra di masyarakat¹².

Bagi preman, masa reformasi membuka ruang bagi mereka untuk membangun citra yang sudah buram di masyarakat. Citra mereka yang buram itu coba mereka rombak agar masyarakat tidak lagi memandang mereka sebagai sampah masyarakat, akan tetapi justru teman mereka, bahkan menjadi pelindung mereka. Menjadi menarik untuk melihat fenomena Paguyuban Kawulo Alit yang terjadi dalam kasus pembentukan kelompok kekerasan berbasis premanisme di Yogyakarta. Kelompok ini mempunyai sejarah panjang keterkaitannya dengan dunia preman. Akan tetapi organisasi ini mengklaim memiliki nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kerakyatan. Sebuah fenomena yang absurd karena ada nilai-nilai yang amat bertentangan di dalamnya.

Fenomena Kawulo Alit menjadi signifikan untuk dikaji karena klaim mereka yang mempunyai nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kerakyatan, akan tetapi dibangun dengan logika premanisme oleh anggota preman-preman. Untuk melihat sejauh mana klaim tersebut, maka digunakanlah sebuah tolak ukur yaitu "nalar preman". Jika terdapat nalar preman dalam paguyuban ini maka sejatinya organisasi ini adalah sebuah cara bagi para preman untuk menaikkan citra mereka di mata masyarakat, namun tidak akan terlihat bahwa

¹¹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal.74--78.

¹² Abdur Rozaki, *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi* (Yogyakarta : IRE Press, 2006), hal. 36.

terjadi transformasi nilai besar-besaran yang terjadi di dalam tubuh preman. ternyata apa yang terjadi pada kasus Kawulo Alit adalah fenomena premanisme yang terlembaga secara rapi.

Lahirnya Paguyuban Kawulo Alit "Mrantasi Gawe"

Paguyuban Kawulo Alit mempunyai sejarah persinggungan secara sosiologis dengan masyarakat di masa lampau. Tercatat dalam berbagai kasus sengketa antara masyarakat dengan negara di wilayah Sleman maupun Kota Yogyakarta, pemerintah pada saat itu menyewa kelompok-kelompok preman guna memberikan rasa intimidasi maupun koersifitas pada masyarakat agar menarik tuntutannya. Adanya preman-preman sebagai "benteng" bagi pemerintah membawa implikasi bagi terlibatnya preman-preman yang salah satunya dimotori Yohanes Wibawa untuk turut serta dalam sengketa tersebut. Yohanes Wibawa dan rekan-rekan premanya segera mnegkonsolidasikan diri guna mendampingi masyarakat guna menghadang pemerintahan. Situasi inilah yang menjadi cikal-bakal berdirinya Paguyuban Kawulo Alit di hari ini¹³.

Paguyuban Kawulo Alit mempunyai struktur yang cukup kompleks dengan beberapa badan kusus seperti adanya Dewan Pertimbangan Organisasi yang diketuai Yohanes B. Wibawa, Dewan Pengurus harian yang diketuai R Suharyanto, dan divisi-divisi khusus (berjumlah 8) yang mempunyai tugas-tugas tersendiri. Selain adanya bagian-bagian tersebut Kawulo Alit juga mempunyai koordinator wilayah yang dibawahinya, yaitu wilayah Kota Yogya dikoordinasi Sapto, Kulonprogo dikoordinasi Ipung, Gunungkidul dikoordinasi Yanto, di Klaetn dikoordinasi Sugiyanta, dan Bantul (dibagi 8 wilayah dengan koordinasi tersendiri)¹⁴.

Paguyuban ini menyatakan dirinya sebagai wadah untuk memperjuangkan harkat, martabat dan kesejahteraan bagi anggota masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota maupun masyarakat pada umumnya. Menariknya paguyuban ini mempunyai visi menjadi bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Secara semboyan menjadi sangat menarik untuk melihat sepak terjang komunitas preman mampu mengorganisasikan dirinya guna mewujudkan tatanan masyarakat demokratis seperti yang menjadi misi organisasinya. Jika ditinjau dengan tolak ukur nalar preman, maka akan terlihat bahwasanya lembaga ini dibentuk bukan hanya bervisi tujuan kemanusiaan, akan tetapi lebih banyak bermanfaat bagi anggotanya sendiri yaitu preman. Fenomena Kawulo Alit kemudian dapat dibaca sebagai "alat" bagi preman-preman untuk "memutihkannya diri" dengan mengorganisasikan dirinya dan

¹³ Suharyanto, *Paguyuban Kawulo Alit* (Yogyakarta, : LBH Apik, 2010), hal.2.

¹⁴ *Ibid*

melakukan berbagai acara yang pro-rakyat. Terhitung bahwa paguyuban ini melakukan berbagai acara yang disenangi masyarakat Yogyakarta seperti mengadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, melakukan kerja bakti sosial, membangun koperasi, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika masyarakat Yogyakarta dikejutkan oleh bencana Gunung Merapi, paguyuban ini mengorganisasikan dirinya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban. Oleh karenanya, paguyuban ini mempunyai nilai plus bagi anggotanya (preman) yaitu memperoleh tempat di masyarakat (mengokohkan posisinya) seperti kegiatan yang sifatnya sosial sehingga citra preman yang tergabung dalam paguyuban tersebut akan berubah, bahkan dapat menjadi tokoh masyarakat¹⁵. Selain itu paguyuban ini sebenarnya merupakan sebuah jalan untuk melakukan koordinasi secara lebih baik diantara preman itu sendiri, yang tersebar di berbagai wilayah di DIY.

Strukturasi Premanisme & Bisnis Kekerasan

Preman-preman yang tergabung dalam Paguyuban Kawulo Alit diuntungkan oleh adanya organisasi ini yang membuat langkah-langkahnya semakin mudah. Paling tidak ada beberapa sumber (pekerjaan) yang dikoordinasikan oleh lembaga ini pada para anggotanya (preman) salah satunya adalah jasa keamanan. Dalam jasa keamanan inilah, ada berbagai jenis pekerjaan yang ditawarkan, mulai dari tukang parkir sampai pekerjaan berkelas sebagai *bodyguard* orang - orang penting. Tercatat bahwa pengelolaan tukang parkir di daerah-daerah yang dikuasainya seperti halnya di kota Yogyakarta. Jasa keamanan ini juga semakin dikembangkan Paguyuban Kawulo Alit dengan mendirikan sebuah CV yang bergerak di bidang *security* perusahaan profesional¹⁶. Tercatat ada tiga level *security* yang ditawarkan oleh CV ini yaitu *security* reguler, pengamanan event, dan pengamanan VIP. Dari jasa-jasa keamanan seperti inilah uang mengalir ke anggota-anggota Paguyuban Kawulo Alit sekaligus memberdayakan mereka di tempat-tempat yang strategis. Adanya jasa keamanan yang sejatinya mempunyai kata kunci "kekerasan" memegang peranan penting dalam paguyuban ini, karena menjadi "mata pencaharian"

¹⁵ Keinginan Preman untuk menjadi tokoh masyarakat diungkapkan Pembimbing Kawulo Alit Yohanes Wibowo, dimana menurutnya preman (khususnya) di Yogyakarta memiliki keunikan dibanding preman di daerah lain. Karena preman di Jawa masih mengadopsi kultur jawa yang ada di masyarakat, sehingga preman-preman yang ada tidaklah merupakan bagian yang terpisah dari masyarakat itu sendiri. Bahkan dapat menjadi tokoh dari masyarakat. Berbeda dengan di daerah lain yang akar-akar budayanya tidak ada sehingga terjadi "gap" antara masyarakat dan preman.

¹⁶ Data diolah dari hasil Wawancara dengan Yohannes Wibawa dan Kebo pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di LBH Apik jam 15.30 WIB.

utama bagi anggotanya. Terlihat jelas bahwa basis dasar dari preman yaitu kekuatan, kekuasaan dan kekerasan informal yang tergambar jelas dari jasa-jasa pengamanan seperti ini. Fakta ini menunjukkan bahwa nalar preman masih bekerja dalam pembiayaan Paguyuban Kawulo Alit ini. Selain jasa keamanan yang ditawarkan, ada juga koperasi yang didirikan di samping markas organisasi tersebut. Koperasi yang dibentuk tersebut memiliki kontribusi positif bagi anggota untuk mengelola aset yang dikelolanya untuk dipakai modal dagang. Secara sepintas memang koperasi tidak ada sangkut pautnya dengan kekerasan sama sekali, namun perlu dipahami bahwa koperasi ini digerakkan oleh dana-dana dari anggota Paguyuban Kawulo Alit. Sehingga dana dari koperasi ini tergantung dari penghasilan-penghasilan anggotanya yang dibasiskan pada kekerasan. Selain itu koperasi ini mempunyai makna lain. Salah satu program untuk mengubah citra negatif preman di mata masyarakat dengan adanya koperasi di samping markas preman akan mengurangi citra preman sebagai oknum yang negatif, bahkan bisa mejadi tempat bagi bertemunya anggota preman dan masyarakat untuk melakukan berbagai dialog untuk mencairkan hubungan yang sebelumnya ada.

Konflik Kekerasan Antar Kelompok Preman

Pengelolaan lahan parkir yang menjadi salah satu basis pendapatan utama anggota Paguyuban Kawulo Alit tidaklah sepi dari konflik. Karena ada berbagai organisasi preman lain yang juga menginginkan tempat parkir sebagai lahan garapan ekonomi mereka. Maka dalam hal ini Paguyuban Kawulo Alit akan mengorganisasikan dirinya dan melakukan berbagai upaya perlawanan jika ada organisasi preman lain yang berusaha menyerobot lahan mereka. Apa yang terjadi adalah saling adu kekuatan, apabila anggota preman lawan lebih kecil pengaruhnya maka masalah akan segera selesai karena mereka akan menghindari pertempuran yang secara perhitungan akan kalah. Akan tetapi jika terjadi bentrokan, maka Paguyuban Kawulo Alit akan menanggapi dengan penyerangan yang lebih hebat pula. Jalan kekerasan dengan adu kekuatan inilah sejatinya yang ada dalam pengelolaan lahan parkir. Jadi amat berbeda dengan slogan demokrasi dan kerakyatan karena bukan dialog ataupun negosiasi, akan tetapi kekerasan dan adu kekuatan. Fakta inilah yang sesungguhnya mencerminkan jauhnya kebenaran pernyataan apabila disesuaikan dengan visi misi organisasi. Walaupun begitu di kalangan internal organisasi mereka juga berupaya untuk mencegah konflik dengan upaya-upaya non-kekerasan. Bisa dikatakan petinggi-petinggi organisasi Paguyuban Kawulo Alit merupakan mediator bagi anggota-anggota dibawahnya¹⁷. Jika terjadi konflik antar anggota

¹⁷ Data diolah dari hasil Wawancara dengan Kebo pada tanggal 8 Oktober 2010 bertempat di LBH Apik jam 14.30 WIB

para petinggi akan mempertemukan kedua belah pihak untuk duduk bersama membahas masalah untuk mencari solusi mengani permasalahan yang menyebabkan mereka berkonflik. Upaya sebagai mediator juga coba diperankan oleh petinggi-petinggi ketika terjadi konflik antar anggota dengan kelompok lain. Berbagai upaya negosiasi mulai dilakukan dengan kelompok preman lain untuk menyelesaikan masalah. Namun ketika negosiasi tersebut gagal, Paguyuban Kawulo Alit tidak akan segan memberikan dukungan kekuatan untuk mem *back up* anggotanya yang terlibat perselisihan dengan anggota lain.

Meskipun ada upaya perubahan perilaku yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dimana penggunaan kekerasan mulai dikurangi oleh petinggi di organisasi Kawulo Alit. Namun kekerasan tidak bisa dihilangkan. Mereka sekarang cenderung bersikap "*defensive*" dengan menggunakan cara-cara non-kekerasan namun mereka juga siap menggunakan kekerasan jika dinilai cara tersebut memang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

Meskipun Paguyuban Kawulo Alit ini adalah sebuah organisasi, ternyata yang menjadi tempat pembahasan dan pertemuan dari berbagai anggotanya tidak hanya dilakukan di markas mereka Akan tetapi juga di kafe tempat biasa mereka berkumpul milik salah seorang anggotanya. Di dalam kafe itulah berbagai hal mereka bicarakan sekaligus juga sebagai ajang komunikasi antara preman. Kafe tersebut biasanya tertutup pada siang hari dan buka di malam hari (selayaknya kafe yang lain) sedangkan kantor dan koperasi buka dan beroperasi siang hari. Meskipun dalam berbagai waktu terlihat kosong, dua tempat tersebut digunakan preman sebagai tempat berkumpul. Tidak jarang komunikasi dilakukan lewat *handphone*, mengingat adanya berbagai kesibukan yang dilakukan masing - masing anggota di berbagai tempat. Khusus yang menjadi penjaga *bodyguard* yang sangat sulit untuk bertemu langsung karena tugasnya mengawal, dan pemimpin - pemimpin organisasi yang juga sibuk dengan kegiatan - kegiatan mereka baik di wilayah Kota Yogyakarta maupun di luar daerah. Salah satu event yang penting dalam organisasi ini adalah adanya rapat besar preman yang dilakukan beberapa waktu sekali dengan tempat di markas (kantor) mereka ataupun di kafe tempat biasa. Rapat besar ini dihadiri baik oleh petinggi Paguyuban Kawulo Alit, maupun bawahan - bawahan yang menjadi koordinator - koordinator wilayah di Kota Yogyakarta maupun di luar daerah. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal tidak hanya mengenai Paguyuban Kawulo Alit, tetapi berbagai permasalahan lain yang terjadi di antara anggotanya. Adanya rapat besar preman ini sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam organisasi tersebut juga terdapat hierarki yang sangat terlihat, mengingat adanya beberapa nama diantara para preman yang dituakan (senior) dan mempunyai kelebihan dibandingkan anggota-anggota yang lain. Sehingga

watak preman sebenarnya mendominasi Paguyuban Kawulo Alit ini meskipun di luar mereka melakukan berbagai kegiatan sosial¹⁸.

Demokratisasi Preman?

Melihat berbagai kegiatan Paguyuban Kawulo Alit yang mencerminkan akar preman mereka, maka sejatinya sudah cukup untuk menggambarkan bahwa organisasi ini adalah sebuah upaya preman membungkus dirinya agar dapat menghilangkan citra negatif yang melekat pada dirinya. Namun ada beberapa peristiwa menarik yang dapat menjadi sebuah pemikiran yaitu adanya pengajaran hukum bagi para anggota-anggotanya. Hal ini disampaikan oleh Penasihat Paguyuban Kawulo Alit Yohanes Wibawa, bahwa ada pengajaran hukum bagi anggota-anggotanya. Menjadi menarik untuk mengkaji adanya upaya "sadar hukum" yang dilakukan di kalangan Paguyuban Kawulo Alit ini. Sehingga apabila anggota-anggota yang tergabung di dalamnya mengerti hukum maka sejatinya akan ada pendidikan politik di dalamnya. Pembelajaran hukum ini mungkin dapat dikatakan "sebuah trend" karena terlihat di layar kaca bahwa figur publik yang terkena masalah dengan polisi, justru ingin belajar mengenai hukum. Hal inilah yang terjadi pada diri preman - preman dengan adanya upaya sadar hukum sehingga berimplikasi pada cara mereka memandang persoalan dengan pemerintah. Fenomena ini mungkin juga memiliki korelasi dengan nmasa lalu keterlibatan mereka dengan LSM dalam membantu masyarakat menghadapi pemerintah. Dimana pada saat itu, pemerintah juga menggunakan preman sebagai "benteng" untuk menghadapi warga. Fenomena keberpihakan Paguyuban Kawulo Alit dengan LSM pro rakyat ini mungkin juga menandai cara baru preman menghapus citra jeleknya di masyarakat. Dengan menempatkan dirinya di barisan masyarakat bahkan menyerang pemerintah (dengan watak kekerasan) sejatinya membuat sebuah fenomena baru bahwa preman menggunakan kekerasannya untuk melawan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Jika dipandang dari sisi ini, maka ada dua hal yang menguntungkan baik bagi preman yaitu tetap mempertahankan watak kekerasan mereka dan sekaligus menghapus citra negatif di masyarakat.

Kesimpulan

Paguyuban Kawulo Alit merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh komunitas preman yang mempunyai latar belakang kerjasama dengan LSM dalam membela masyarakat. Pembentukan organisasi ini dengan berbagai tindakan sosialnya tersebut jika dilihat dengan tolak ukur watak preman. Maka

¹⁸ Data diolah dari hasil Wawancara dengan Suharyanto selaku patron utama paguyuban pada 8 November 2010 jam 13.30 WIB.

akan terlihat dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh mereka hanyalah sebuah upaya membersihkan diri dari citra negatif di masyarakat. Akan tetapi, menarik juga untuk dikaji mengenai keberpihakan preman pada warga pada kasus sengketa dengan pemerintah. Ternyata watak kekerasan preman dan sikapnya guna menghilangkan citra negatif berhasil mengalahkan paksaan pemerintah kepada warga. Ini menunjukkan bahwa dari sisi lain preman yang sejatinya dapat berguna bagi masyarakat yaitu sebagai penyeimbang bagi pemerintah.

Terlepas dari persoalan menguntungkan warga, dalam kasus tertentu akan tetap secara umum preman yang tergabung dalam Paguyuban Kawulo Alit yang mendasarkan dirinya pada jasa keamanan dalam banyak hal tentunya akan dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk melindungi berbagai kegiatan yang bahwa hal itu ditentang oleh masyarakat. Apabila di masa depan terjadi benturan antara anggota pengamanan Paguyuban Kawulo Alit dengan warga akan dapat dilihat bagaimana sebenarnya preman itu sendiri, apakah pemimpin organisasi akan menarik mundur anggotanya dari kepentingan rakyat ataukah demi bayaran, mereka "lupa" dengan sejarah mereka membela rakyat menghadapi tindakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito (Ed), 1995, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU-SE UGM.
- Arrendt, Hannah, 2003, *Teori Kekerasan*, Yogyakarta: LPIP.
- Camara, Dom Helder, 2000, *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta: Insist Press
- Christensen, Terry, 1994, *Local Politics: Governing at The Grassroots*, California: Wadsworth Inc.
- Effendy, Tadjuddin & Chris Manning, 1996, *Urbanisasi, Pengangguran, & Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Affan, 2006, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony, 2002, *Sociology*. Oxford : Blackwell Publisher Ltd.
- Marsana, Windu, 1991, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purnomo, Agus, 2009, *Ideologi Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rozaki, Abdur, 2006, *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: IRE Press.
- Santoso, Thomas, 2001, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Surabaya: Pustaka Utan Kayu.
- Suharyanto, 2010, *Paguyuban Kawulo Alit*, Yogyakarta: LBH Apik. (makalah edisi terbatas)

